



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Filma

**Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua
Pegunungan sekaligus Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami serta memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
KPU Provinsi Papua Pegunungan**

AGUS FILMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	B WTP
3	Terwujudnya administrasi penyelenggaraan Pemilu system yang tertib, efektif dan efisien	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase target kinerja KPU Provinsi yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	79 75% 90%
4	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	90%
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%
7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	87,5% 100%

	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Percentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
		Percentase Hasil Notulensi / Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Percentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
12	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Percentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Percentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%
14	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Percentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%
15	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Percentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Percentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu / Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Percentase KPU Kab/Kota yang mendistribusian logistik Pemilu / Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Percentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Percentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
16	Ketersediaan Logistik Pemilu	Percentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	9 satker (Prov/ kab)

Program / Kegiatan Anggaran

1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp.	24.867.000
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.291.569,000
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	592.619,000
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp.	243.340,000
5.	Pemeriksaan Internal KPU	Rp.	14.793,000

Wamena, 01 Oktober 2023

**Kepala Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik KPU Provinsi Papua
Pegunungan**

AGUS FILMA

